



**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Bengkulu**

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	2
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	4
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	8
E. Anggaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	13
B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	19
B. Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	50
BAB IV PENUTUP	52
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan tolak ukur atas siklus implementasi akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020. Laporan ini memuat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sampai dengan Tahun 2019 sebagai bentuk pelaporan dan bahan evaluasi dalam upaya perbaikan manajemen kinerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Secara garis besar, pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan yang positif bila dibandingkan target yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 sebesar 98,97. Namun masih terdapat 5 (lima) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2019.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur serta menilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan menentukan langkah serta kebijakan selanjutnya untuk mendukung perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bengkulu, 30 Januari 2020
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Kepala Perwakilan,



R. Aryo Seto Bomantari S.E., M.M., Ak., CSFA, CA 9
NIP 196705191996031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah unit organisasi eselon I pada kementerian/lembaga dan unit kerja mandiri yang ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara (AKN) V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, kota/kabupaten di Provinsi Bengkulu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN V.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi:

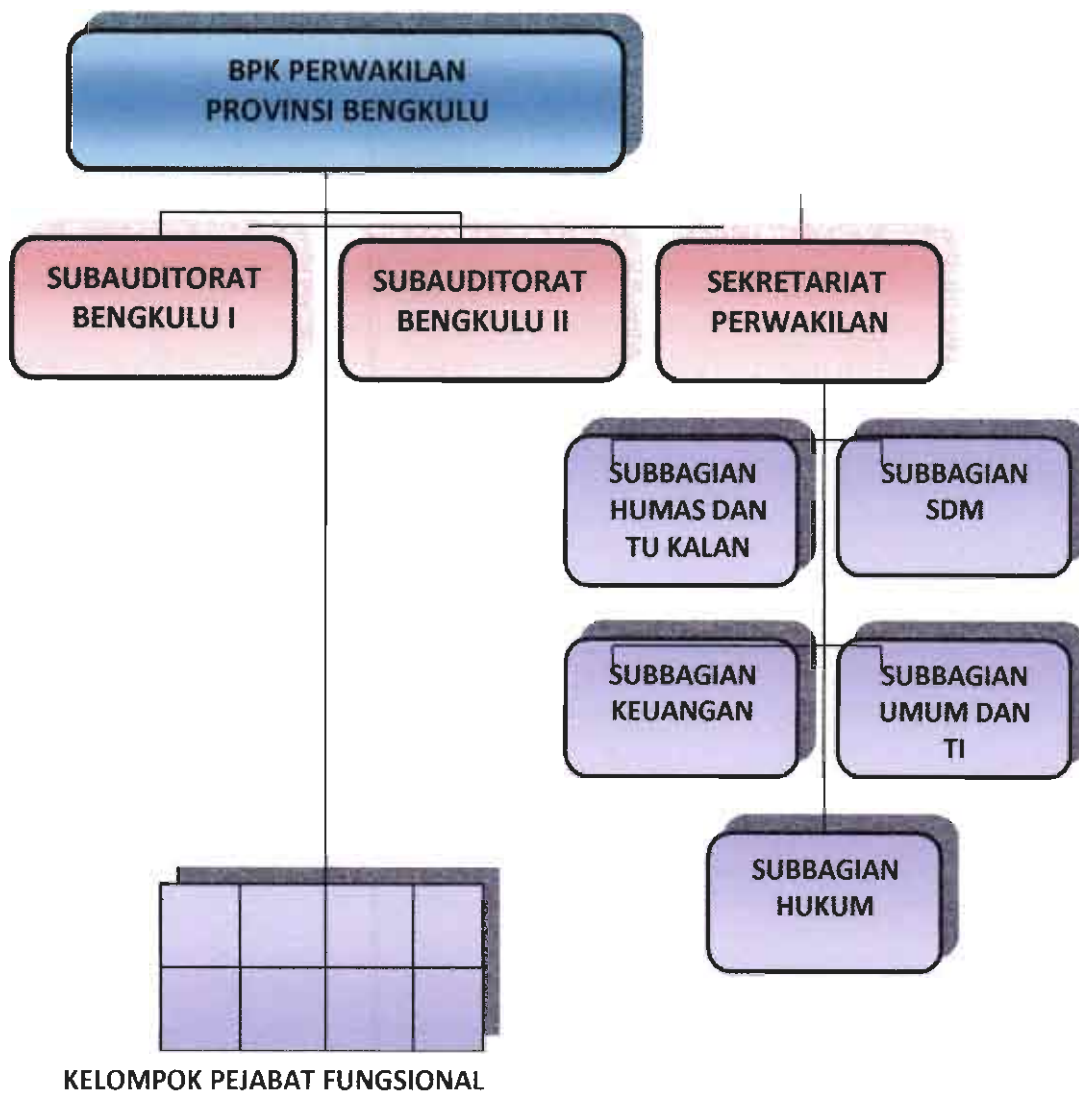
1. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK

- Perwakilan Provinsi Bengkulu yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
 6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
 7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
 8. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
 9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
 10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 11. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 12. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
 13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 14. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
 15. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
 16. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
 17. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
 18. penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
 19. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen tersebut BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai satuan kerja menyusun Laporan Kinerja.

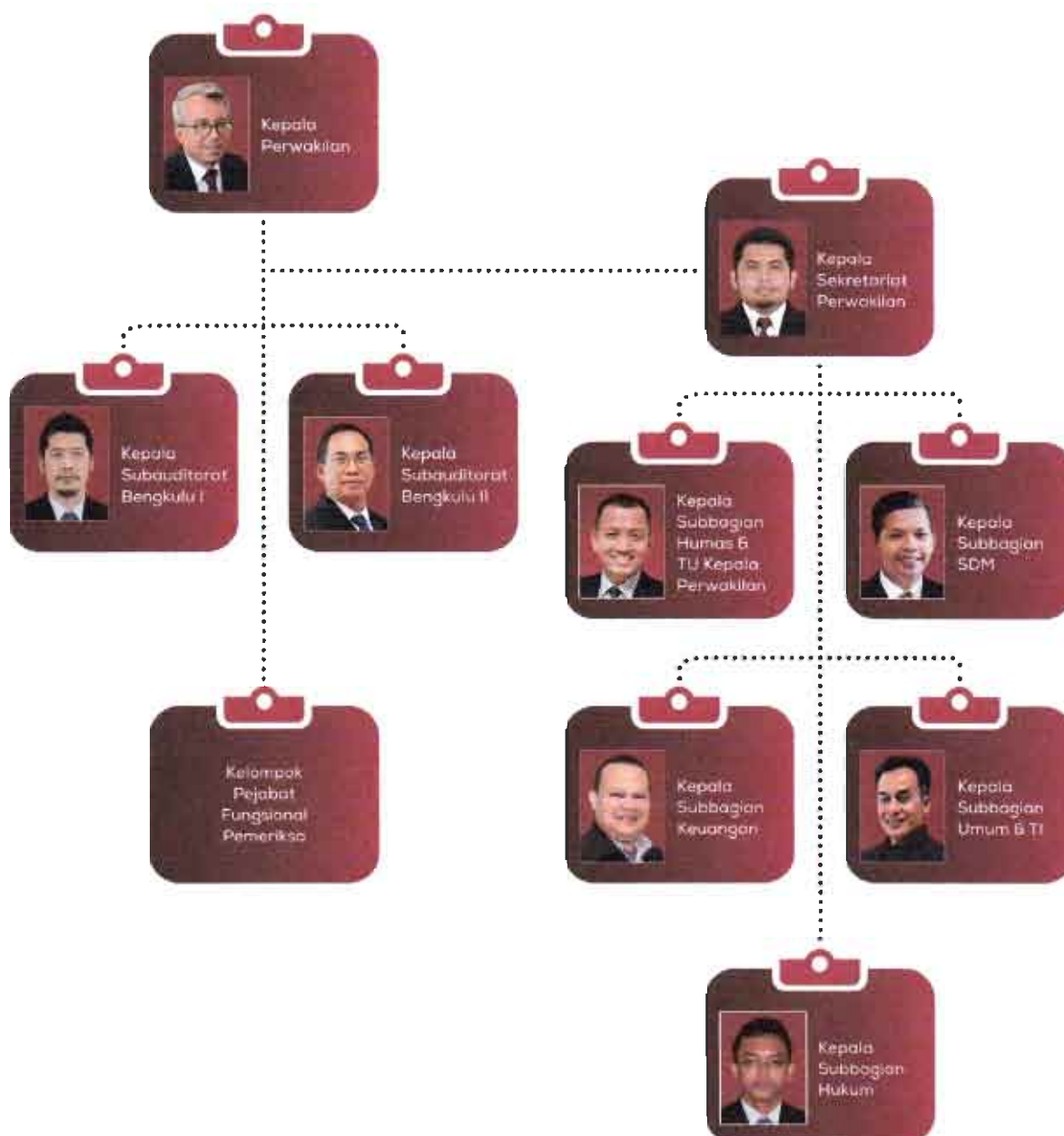
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Bagan 1.1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu



Sumber: Keputusan Ketua BPK No.3/K/I-VIII.2/7/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK

**Gambar 1.1 Pejabat Struktural
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu**



Keterangan:

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Perwakilan	R. Aryo Seto Bomantari, S.E., M.M., Ak., CSFA, CA
2	Kepala Sekretariat Perwakilan	Muhammad Hidayat, S.E.
3	Kepala Subauditorat Bengkulu I	Ranni Agriadi, S.E., M.Si., Ak., CA
4	Kepala Subauditorat Bengkulu II	Indra Syahputra, S.E., M.M., Ak., CA.
5	Kasubag Humas dan TU Perwakilan	Rony Setyo Kurniawan, S.Sos.
6	Kasubag SDM	Adhy Cahyo Nugroho, S.E.
7	Kasubag Keuangan	Drs. Lui Hermawan, MAB.
8	Kasubag Umum dan TI	Iwan Sukma Permana, S.T., M.M.
9	Kasubag Hukum	Cosmas Andri Frans Katri Anggita, M.Si.

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V yang terdiri dari:

1. Subauditorat Bengkulu I

Subauditorat Bengkulu I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPs, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

2. Subauditorat Bengkulu II

Subauditorat Bengkulu II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;

- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

3. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- b. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
- f. penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Bengkulu terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

- b. Subbagian Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- c. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
- e. Subbagian Hukum melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

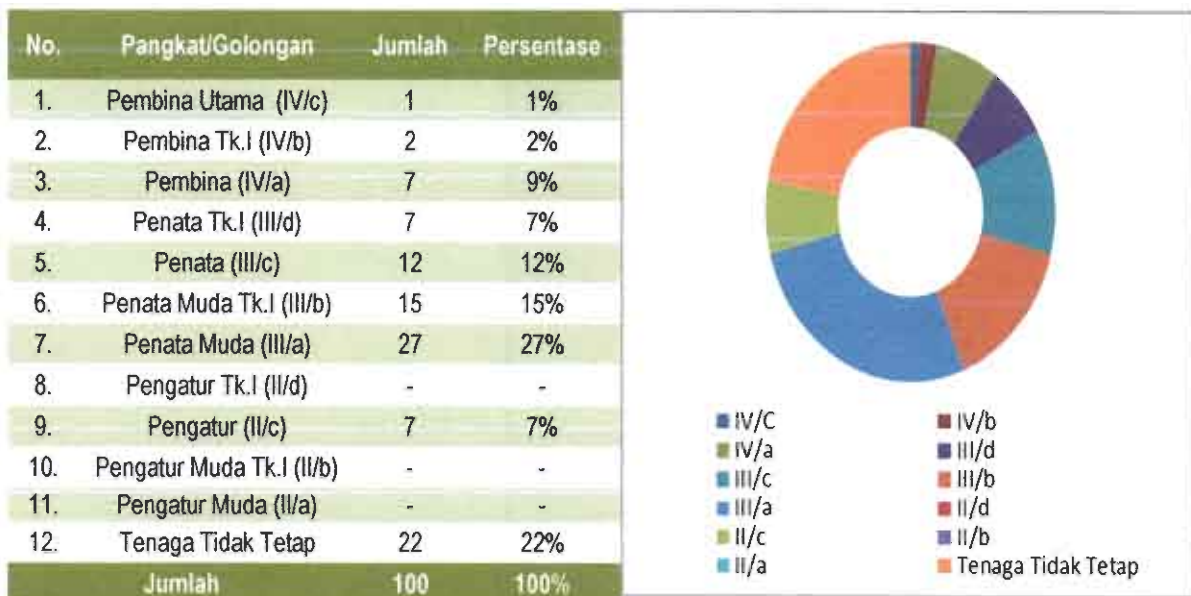
Sumber daya manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu posisi per 31 Desember 2019 berjumlah 78 orang meliputi 9 personil struktural (12%) yang terdiri dari 1 Kepala Perwakilan, 2 Kepala Subauditorat, 1 Kepala Sekretariat Perwakilan, dan 5 Kepala Subbagian, 38 personil di unit kerja penunjang pendukung (49%) dan 31 personil di unit kerja pemeriksaan/auditorat (39%). BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga memiliki pegawai tidak tetap (tenaga kontrak) sebanyak 22 orang, sehingga total seluruhnya 100 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan, SDM BPK Perwakilan Bengkulu (pegawai tetap) terdiri dari: sebanyak 1 orang berjenjang pendidikan S3 (1%), 18 orang berjenjang pendidikan S2 (23%), 49 orang berjenjang pendidikan S1 (63%), 1 orang berjenjang pendidikan D4 (1%), dan 7 orang berjenjang pendidikan D3 (9%), serta sisanya 2 orang berjenjang pendidikan setingkat SMU/SMK/SMEA (3%).

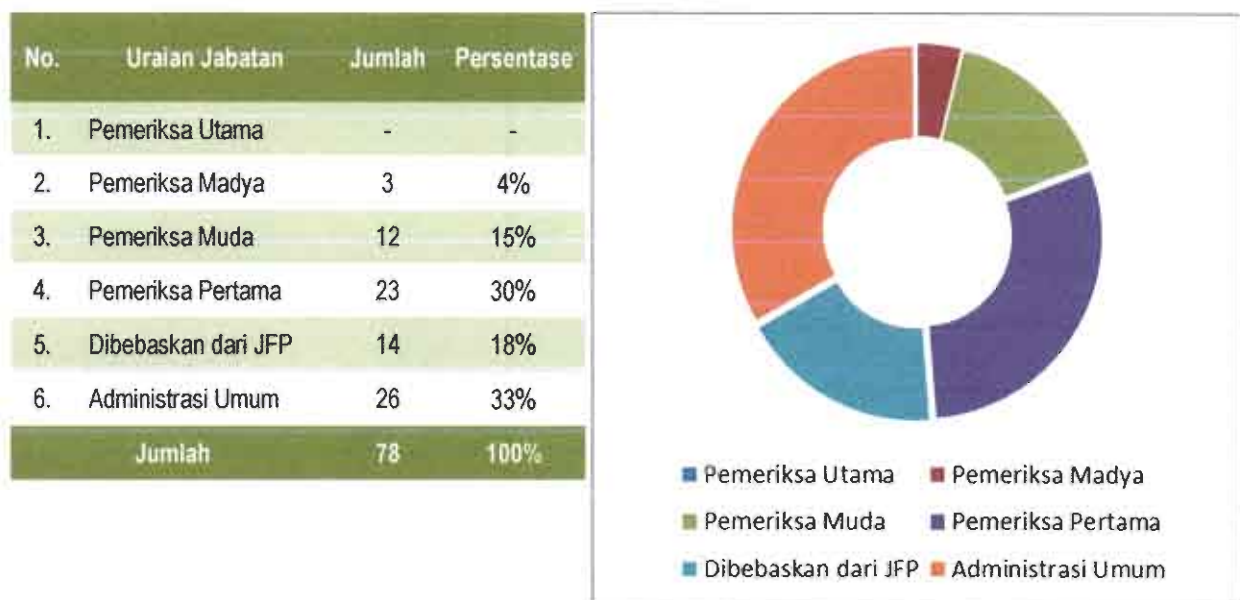
Berdasarkan jenis kelamin, SDM BPK Perwakilan Bengkulu (pegawai tetap) terdiri dari 42 orang pria (54%) dan 36 orang wanita (46%).

Terakhir, berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa dengan jumlah 38 orang terdiri atas 3 orang Pemeriksa Madya (8%), 12 Pemeriksa Muda (32%), dan 23 orang Pemeriksa Pertama (60%).

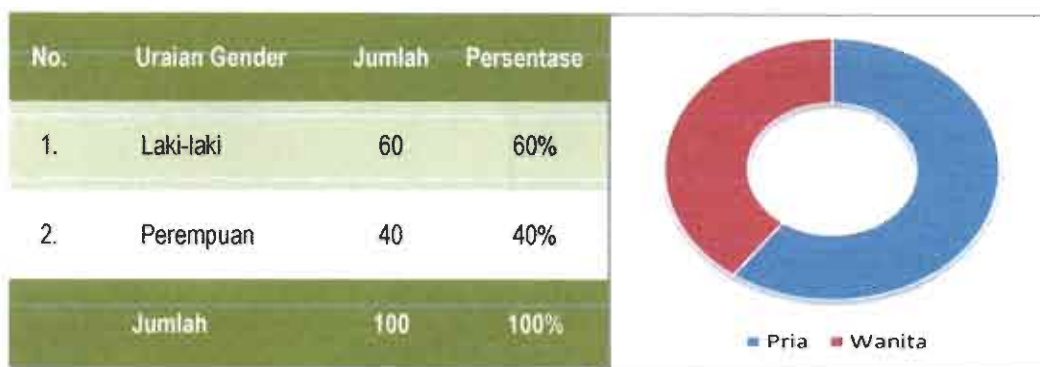
Tabel 1.1 dan Bagan 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan



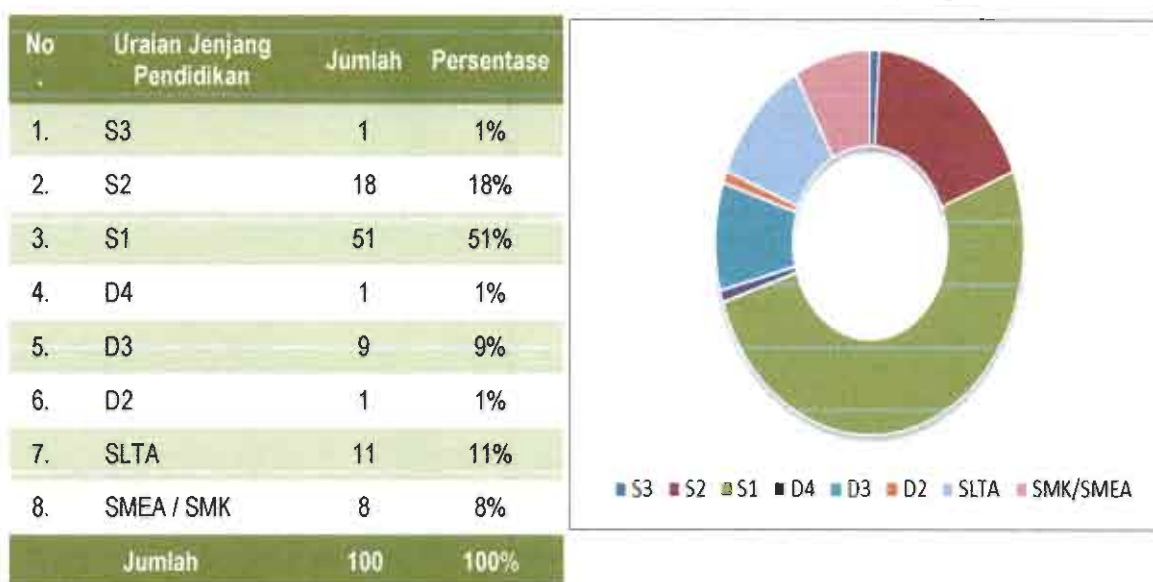
Tabel 1.2 dan Bagan 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa



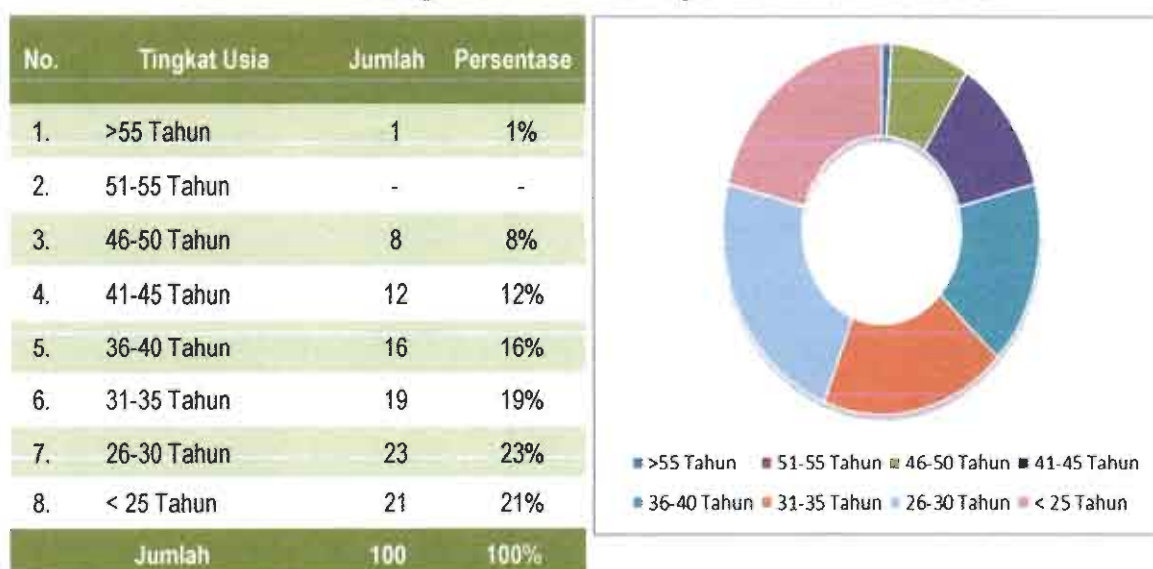
Tabel 1.3 dan Bagan 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender



Tabel 1.4 dan Bagan 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Tabel 1.5 dan Bagan 1.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

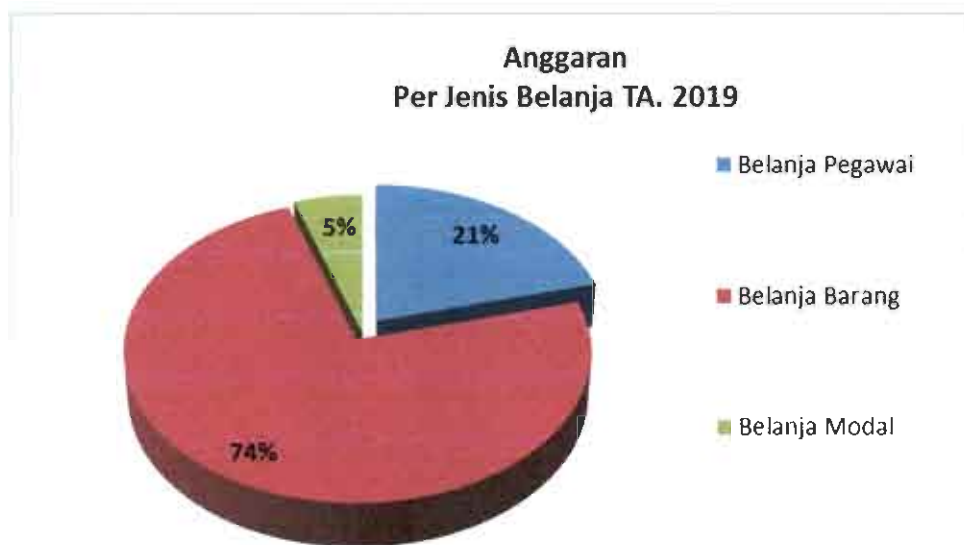


E. Anggaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menganggarkan kegiatan tahun 2019 sebesar Rp19.487.736.000,00. Rincian anggaran belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6 dan Bagan 1.7 Anggaran Belanja Berdasarkan Jenis Belanja TA 2019

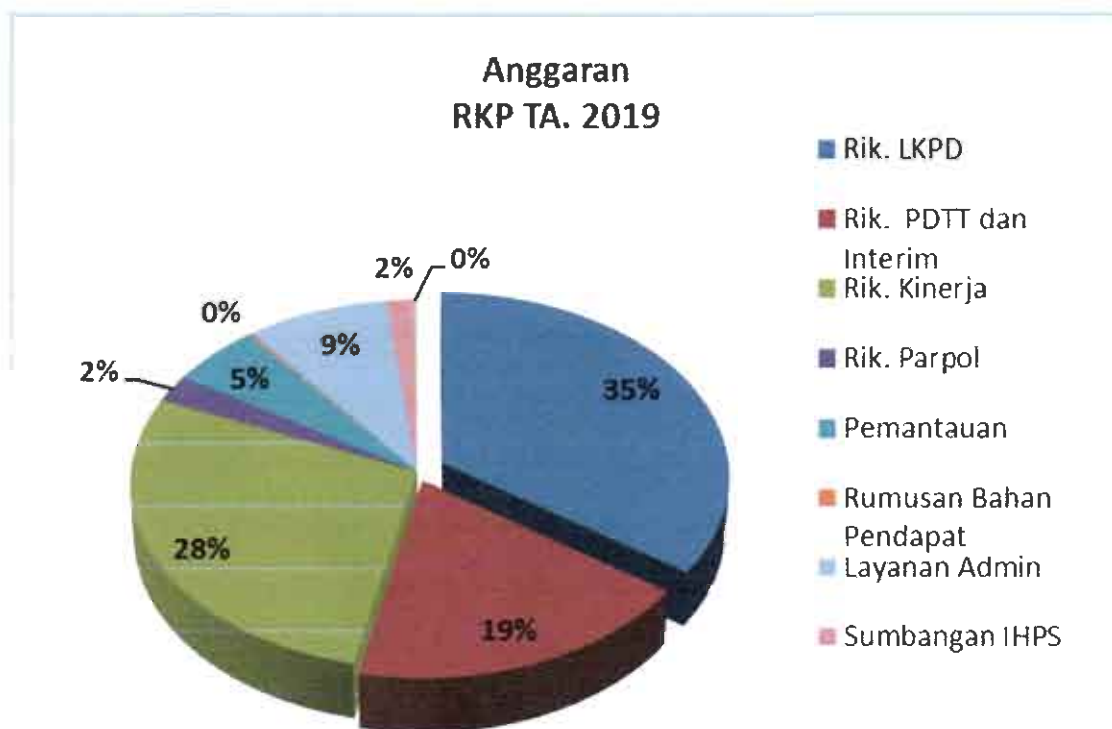
Kode	Uraian	Anggaran (Rupiah)
51	Belanja Pegawai	4.075.838.000,00
52	Belanja Barang	14.406.937.000,00
53	Belanja Modal	1.004.961.000,00
	Jumlah	19.487.736.000,00



Adapaun rincian anggaran yang digunakan dalam mendukung kegiatan pemeriksaan berupa Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun Anggaran 2019 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.7 dan Bagan 1.8 Anggaran RKP Tahun Anggaran 2019

No	Kegiatan	Anggaran (Rupiah)
1	Pemeriksaan LKPD	2.979.685.648,00
2	Pemeriksaan PDDT dan Interim	1.585.967.552,00
3	Pemeriksaan Kinerja	2.407.770.600,00
4	Pemeriksaan Parpol	204.382.200,00
5	Pemantauan	466.030.000,00
6	Rumusan Bahan Pendapat	14.853.000,00
7	Layanan Admin	740.085.000,00
8	Sumbangan IHPS	141.734.000,00
9	Profil Entitas	18.082.000,00
Jumlah		8.558.590.000,00



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

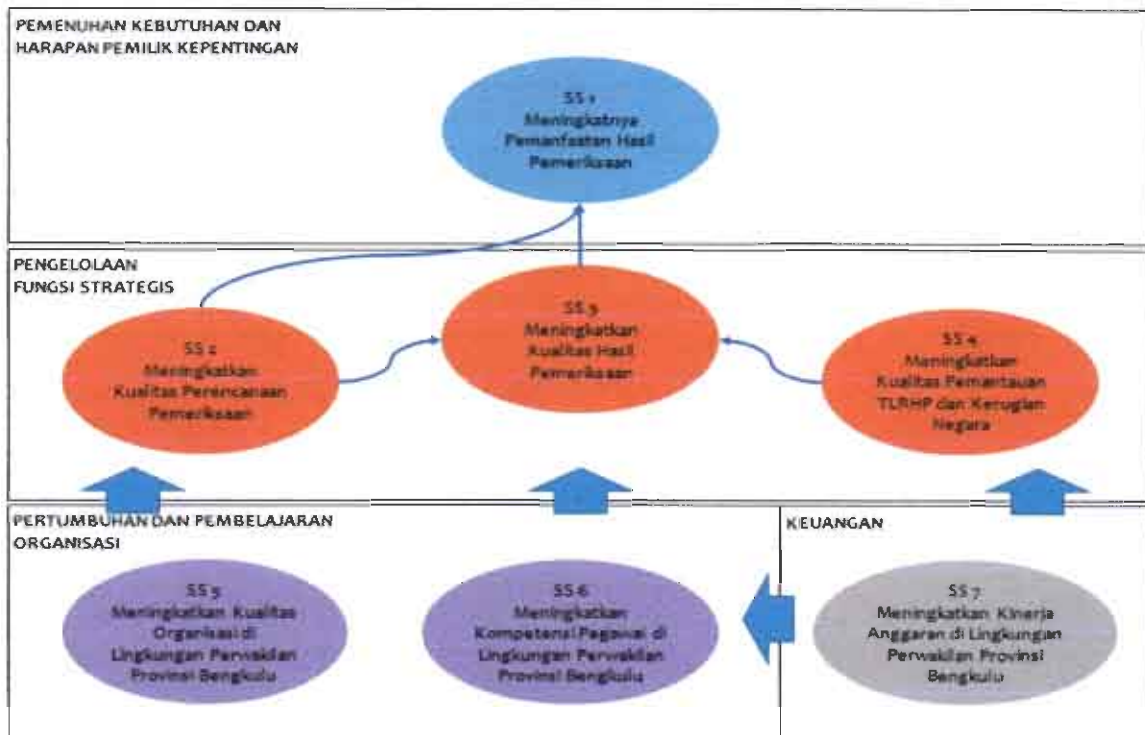
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menetapkan Rencana Strategis tahun 2016-2020 yang berisikan berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya yang sejalan dengan Rentra BPK Wide. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

1. Visi BPK yaitu menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.
2. Misi BPK yaitu a) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan b) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.
3. Nilai Dasar BPK, pencapaian cita-cita yang tertuang dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai sebagai berikut:
 - a. Integritas, BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
 - b. Independensi, BPK menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.
 - c. Profesionalisme, BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
4. Tujuan Strategis yaitu 1) Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan 2) Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.
5. Sasaran Strategis, dalam mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menetapkan sasaran strategis yaitu “meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan”. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini diperlukan penyempurnaan pada proses internal BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan, peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, dan peningkatan kualitas pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara. Penyempurnaan proses internal ini akan dapat terwujud melalui penguatan modal dasar organisasi meliputi peningkatan kualitas organisasi, peningkatan kompetensi pegawai, dan peningkatan kinerja anggaran di lingkungan BPK Provinsi Bengkulu. Keseluruhan

strategi tersebut merupakan sasaran-sasaran strategis yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dan terangkai dalam Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagaimana diilustrasikan seperti di bawah ini.

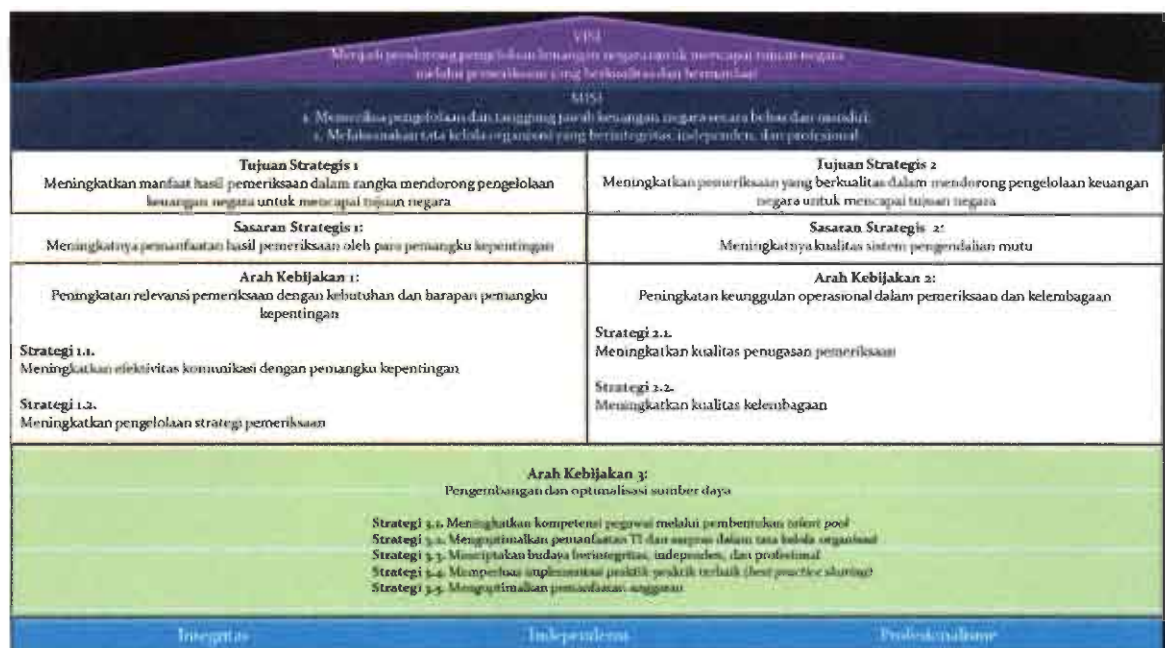
Bagan 2.1 Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu



6. Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mendukung arah kebijakan BPK dalam Renstra 2016-2020 sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bagan 2.2 Framework Renstra BPK 2016 - 2020



Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan Kebutuhan dan Harapan Pemangku Kepentingan.

Hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, arah kebijakan Renstra 2016-2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Artinya, BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK. Arah Kebijakan 1 ini dicapai melalui dua strategi yaitu meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan dan meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan.

Arah kebijakan 2. Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan.

Pengendalian mutu organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara telah ditetapkan dalam *quality control system* atau sistem pengendalian mutu (SPM) yang dalam penilaian kualitas implementasi atas SPM dinilai melalui Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM). Penerapan SPM ini adalah untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta standar pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan BPK. Pedoman pemeriksaan tersebut meliputi kode etik, manajemen pemeriksaan, serta petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pemeriksaan.

SPKM akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satuan kerja (satker) pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan (stakeholders) BPK bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai. Arah kebijakan untuk Renstra 2016-2020 adalah untuk peningkatan keunggulan operasional pemeriksaan yang dilaksanakan dalam koridor SPKM BPK. Fokus penguatan operasional pemeriksaan adalah pada peningkatan kualitas pelaksanaan penugasan pemeriksaan dan peningkatan operasional kelembagaan pendukung dan penunjang pemeriksaan dengan fokus pada proses rewiu dan pengendalian serta penguatan pada peningkatan kepastian hukum dalam mendasari setiap kegiatan operasional organisasi.

Arah kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Sumber daya yang mencukupi merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu perubahan. Renstra 2016-2020 mengagendakan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (*human capital*), modal informasi (*information capital*), modal organisasi (*organization capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan.

Pengelolaan sumber daya manusia difokuskan pada pembentukan *talent pool*, pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan

teknologi informasi yang terintegrasi, dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta pengembangan *best practice sharing*.

Arah kebijakan pada pengembangan dan optimalisasi sumber daya ini dipilih berdasarkan capaian yang telah diraih dari Renstra 2011-2015 khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi terutama *e-audit*, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta struktur organisasi dan tata kelola yang disahkan pada tahun 2014 (SOTK 2014).

Target kinerja merupakan target pencapaian Sasaran Strategis Satker dalam peta strategis masing-masing satker selama lima tahun ke depan. Di samping itu dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan strategis dan sasaran strategis, Perwakilan Provinsi Bengkulu menetapkan tujuh sasaran strategis yang masing-masing memiliki ukuran keberhasilannya (IKU) sebagai berikut.

Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu

No	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	80%
		IKU 1.2. Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,7	3,8	3,9	4
		IKU 1.3. Persentase Penyampaian LHP yang mengandung unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.4. Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.5. Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.6. Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	2	3	4	5
2	SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1. Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	86%	87%	88%	89%
		IKU 2.2. Hasil Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	14%	15%	16%	17%	18%
		IKU 2.3. Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
3	SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1. Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 3.2. Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 3.3. Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
4	SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1. Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 4.2. Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22	22	22	22	22
		IKU 4.3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Nama IKU	Target IKU				
			2016	2017	2018	2019	2020
5	SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu	IKU 5.1. Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu	A	A	A	AA	AA
		IKU 5.2. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 5.3. Persentase Penyusunan <i>Best Practice</i>	0%	0%	20%	20%	50%
		IKU 5.4. Persentase Penyebaran <i>Best Practice</i>	0%	0%	20%	20%	50%
		IKU 5.5. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 5.6. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 5.7. Jumlah Media <i>Relation</i> yang Dilaksanakan	2	3	4	5	6
		IKU 5.8. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	92%	93%	94%	95%
6	SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu	IKU 6.1. Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 6.1. Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non pemeriksaan)	90%	92%	93%	94%	95%
7	SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu	IKU 7.1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu	80%	85%	90%	92%	95%

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, dilaksanakan melalui tiga program. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan. Program dan Kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari struktur organisasi pelaksana BPK, sebagai berikut:

1. Program Teknis 1. Pemeriksaan Keuangan Negara yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu: 1) Pemeriksaan Keuangan Negara; 2) Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; 3) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi; dan 4) Perhitungan Kerugian Negara/Daerah.
2. Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu: 1) Layanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerja Sama Luar Negeri; 2) Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia; dan 3) Layanan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPK.
3. Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK yang berupa kegiatan Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum.

B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V). Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019:

Tabel 2.2 IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Strategi / Anggaran	Indikator Kinerja		Target
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 - Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	25%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%
Strategi 1.2 - Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 - Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 - Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 - Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
Strategi 3.3 - Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 - Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Capaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 berdasarkan hasil validasi sampai dengan Semester II Tahun 2019 yaitu sebesar 98,97. Skor kinerja Tahun 2019 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan pencapaian skor Tahun 2018 yaitu sebesar 96.

Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor Tahun 2019	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019
SS.1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan			
IKU	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas			
1.1	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70,62	75%	52,96%
IKU	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung			
1.2	Unsur Tindak Pidana ke IPH	100	100%	100%
IKU	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian			
1.3	Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100	100%	100%
IKU	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang			
1.4	Dimanfaatkan Ditama Revbang	105	1	2
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan				
IK	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	105	95%	95%
1.1.1				
IK	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	105	25%	
1.1.2				
IK	Tingkat Evaluasi LHP	100	100%	100%
1.1.3				
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara				
IK	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil			
1.2.1	Pemeriksaan	100	100%	100%
IK	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian			
1.2.2	Negara	100	22	22
IK	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan			
1.2.3	Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100	100%	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan				
IK	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i>			
2.1.1	Pemeriksaan	100	100%	100%
IK	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	105	3,9	4,57
2.1.2				
IK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100	100%	100%
2.1.3				
IK	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100	100%	100%
2.1.4				

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor Tahun 2019	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan				
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	93,6	5,0	4,68
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	94,2	5,0	4,71
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100	100%	100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan				
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	90	AA	A
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	104,05	95%	98,85%
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	100	1	1
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100	100%	100%
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100	100%	100%
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	102,32	95%	97,21%
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	105	2	9,80
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan				
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100	100%	100%
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	96	100%	96%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan				
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	105	80%	90,71%

Berikut adalah pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019:

SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan diukur melalui 4 IKU, yaitu IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan target tahun 2019 sebesar 75%, IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH dengan target tahun 2019 sebesar 100%, IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli dengan target tahun 2019 sebesar 100%, IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 1 (satu) bahan pendapat yang disampaikan.

Adapun realisasi dan nilai IKU masing-masing upaya peningkatan fungsi manajemen pemeriksaan tersebut pada tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Realisasi IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tahun 2019 baru mencapai 52,96% atau belum memenuhi target tahun 2019 sebesar 75%. IKU 1.1 ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dalam periode 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 3.2 Realisasi IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan							
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70,62	75%	52,96%	44,62%	45,83%	50,72%

Sampai dengan tahun 2019 terdapat 3.474 rekomendasi yang telah disampaikan ke Pemerintah Daerah. Dari jumlah tersebut terdapat 1.840 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (52,96%), 1.480 rekomendasi yang belum selesai atau masih dalam proses (42,60%), dan 154 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (4,43%), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selama Lima Tahun Terakhir

No.	Entitas	Temuan	Reko- mendasi	Status Tindak Lanjut Rekomendasi							
				Telah Sesuai		Belum selesai atau masih dalam proses		Belum ditindaklanjuti		Tidak dapat ditindaklanjuti	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Provinsi Bengkulu	197	648	288	44,44	334	51,54	26	4,01	-	-
2	Kab. Kaur	115	243	126	51,85	102	41,98	15	6,17	-	-
3	Kab. Mukomuko	114	264	162	61,36	95	35,98	7	2,65	-	-
4	Kab. Bengkulu Selatan	103	282	96	34,04	150	53,19	36	12,77	-	-
5	Kab. Bengkulu Utara	115	310	201	64,84	109	35,16	-	-	-	-
6	Kab. Kepahiang	76	181	103	56,91	65	35,91	13	7,18	-	-
7	Kab. Bengkulu Tengah	69	239	152	63,60	84	35,15	3	1,26	-	-
8	Kab. Lebong	107	262	124	47,33	118	45,04	20	7,63	-	-
9	Kab. Rejang Lebong	79	205	133	64,88	72	35,12	-	-	-	-
10	Kab. Seluma	89	274	88	32,12	174	63,50	12	4,38	-	-
11	Kota Bengkulu	183	566	367	64,84	177	31,27	22	3,89	-	-
Jumlah		1.247	3.474	1.840	52,96	1.480	42,60	154	4,43	-	-

Capaian IKU 1.1. tahun 2019 sebesar 52,96% dengan nilai 70,62 atau belum mencapai target yang diharapkan disebabkan sebagian besar entitas telah menindaklanjuti rekomendasi, namun rekomendasi yang ditindaklanjuti masih belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut. Selain itu, terdapat kecenderungan kurangnya kesadaran entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, khususnya

kurang proaktifnya entitas dalam mengupayakan percepatan penyelesaian tindak lanjut.

Sementara itu, perbandingan realisasi persentase penyelesaian TLRHP tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi IKU 1.1 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020	
	2016	2017	2018	2019	2020			
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan								
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	80%	52,96%	66,20%

Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dalam hasil pemeriksaannya, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu secara berkala telah melakukan pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dengan seluruh pihak Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Bahkan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyelesaian tindak lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah mengimplementasikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (SIPTL) sebagai sarana penginputan dan pemvalidasian bahan tindak lanjut berbasis TI.

Sebagai wujud komitmen untuk mendorong percepatan penyelesaian TLRHP, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyelenggarakan forum pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dengan pihak Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 5 Juli 2019 dan *Focus Group Discussion* (FGD) Eksekutif, Pemantauan TLRHP dan Sosialisasi SIPTL pada tanggal 11 s.d. 15 November 2019. Forum tersebut diikuti oleh para Kepala Daerah, Kepala Inspektorat dan pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Pada forum tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga melakukan pendampingan bagi entitas yang menghadapi kendala dalam memanfaatkan aplikasi SIPTL.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyediakan ruang *Helpdesk* Pemantaun Tindak Lanjut, dengan tujuan untuk membantu entitas dalam melakukan penginputan pada Aplikasi SIPTL dan membuka forum konsultasi bila menghadapi kendala dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPK.

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 1.1, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp110.119.000,00 dengan realisasi sebesar Rp103.461.669,00 atau 93,95%.



Gambar 3.1 Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan



Gambar 3.2 Ruang Helpdesk Pemantauan Tindak Lanjut

2. Realisasi IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH tahun 2019 adalah sebesar 100,00% atau sudah sama dengan tahun 2019 sebesar 100%. IKU ini menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi. Setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Ditama Binbangkum pada tahun berjalan untuk disetujui dan disampaikan ke IPH. Apabila belum terdapat temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dari LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada IPH, Perwakilan tetap mendapat nilai sebesar 100%.

Tabel 3.5 Realisasi IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan							
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100,00	100%	100%	100%	100,00%	0,00%

Untuk memperoleh capaian IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melakukan kajian atas suatu temuan pemeriksaan yang diindikasikan mengandung unsur tindak pidana. Kajian tersebut melibatkan tim pemeriksa, Kepala Subauditorat, Kepala Subbagian Hukum dan Kepala Perwakilan. Jika dari hasil kajian tersebut disepakati bahwa suatu temuan pemeriksa mengandung indikasi tindak pidana, maka Kepala Perwakilan akan meminta pertimbangan kepada Ditama Binbangkum dan dilanjutkan dengan pembahasan bersama Auditorat Utama Investigasi (AUI). Berdasarkan pertimbangan dan hasil pembahasan inilah suatu temuan pemeriksaan dinyatakan mengandung/tidak mengandung unsur tindak pidana.

Selama tahun 2019, Perwakilan Provinsi Bengkulu tidak menyampaikan temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana ke Ditama Binbangkum untuk dapat disetujui dan disampaikan ke IPH. Hal tersebut dikarenakan tidak menemukan indikasi tindak pidana yang harus dilaporkan kepada Instansi Penegak Hukum (IPH), temuan pemeriksaan yang berindikasi dan berpotensi merugikan keuangan negara pada tahun 2019 telah seluruhnya atau sebagian ditindaklanjuti dengan penyetoran Ke Kas Daerah oleh entitas. Ke depan, BPK Perwakilan Bengkulu akan mempertimbangkan temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana yang nilainya signifikan dan belum ditindaklanjuti untuk disampaikan ke IPH. Dengan demikian nilai IKU 1.2 tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

Sementara itu, perbandingan realisasi IKU 1.2 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi IKU 1.2 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan								
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 1.2, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp25.846.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.283.460,00 atau 93,95%.

3. Realisasi IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli tahun 2019 adalah sebesar 100,00% atau sama dengan target tahun 2019 sebesar 100%. IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan yang meliputi perhitungan kerugian negara/daerah (yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK) dan pemberian keterangan ahli. Apabila belum terdapat permintaan perhitungan kerugian negara maupun pemberian keterangan ahli, Perwakilan tetap mendapat nilai sebesar 100%.

Tabel 3.7 Realisasi IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2019	Target 2019	Capaian			
			2019	2018	2017	2016
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						
IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100,00	100%	100%	101,00%	102,00%	100,00%

Selama tahun 2019, pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu tidak terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) yang diterbitkan dan disampaikan kepada IPH maupun permintaan untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan. Meskipun BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melalui Subbagian Hukum dan Tim Pemeriksa telah melakukan beberapa pembahasan dengan IPH dan AUI, namun sampai dengan akhir tahun 2019, belum semua permintaan data dan dokumen untuk melakukan penghitungan kerugian negara/daerah dapat dipenuhi oleh IPH. Selain itu, belum terdapat permintaan untuk memberikan keterangan ahli.

Sementara itu, perbandingan realisasi IKU 1.3 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi IKU 1.3 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan							
IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 1.3, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp22.232.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.887.947,00 atau 93,95%.

4. Realisasi IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang tahun 2019 adalah sebanyak 2 (dua) bahan pendapat atau melampaui target tahun 2019 yaitu sebanyak 1 (satu) Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang. IKU ini menunjukkan tingkat produktivitas terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Tabel 3.9 Realisasi IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan							
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	105,00	1	2	1	1	1

Selama tahun 2019, Perwakilan Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyusun dua Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang dengan judul:

- Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Jasa Pelayanan Kesehatan (Medik) bagi PNSD yang bekerja pada BLUD Rumah Sakit; dan
- Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah atas Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2018.

Dengan demikian nilai IKU 1.4 Tahun 2019 adalah sebesar 105,00.

Sementara itu, perbandingan realisasi IKU 1.4 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi IKU 1.4 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target 2020					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
SS.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan								
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2	2	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IKU 1.4, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp14.853.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.769.400,00 atau 99,44%.

Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan diukur melalui 3 IK, yaitu IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan dengan target tahun 2019 sebesar 95%, IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP dengan target tahun 2019 sebesar 25%, dan IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP dengan target tahun 2019 sebesar 100%.

Adapun realisasi dan nilai IK masing-masing upaya peningkatan fungsi Kualitas Perencanaan Pemeriksaan tersebut pada tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Realisasi IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan tahun 2019 telah mencapai 100% atau sudah melampaui target tahun 2019 sebesar 95%. IK ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk tema dan fokus pemeriksaan. IK bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK.

Tabel 3.11 Realisasi IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan							
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	105	95%	100%	100%	95,00%	95,00%

Pada tahun 2019, Perwakilan Provinsi Bengkulu telah mendapat penilaian Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan dengan nilai 100%. Dengan demikian, nilai IK 1.1.1 Tahun 2019 adalah sebesar 105,00.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 1.1.1 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi IK 1.1.1 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan								
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	85%	85%	90%	95%	100%	100%	

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.1.1, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.142.667.208,00 dengan realisasi sebesar Rp2.035.533.848,00 atau 95,00%.

2. Realisasi IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP Tahun 2019 telah mencapai 28,57% atau telah melampaui target tahun 2019 sebesar 25,00%. IK ini menunjukkan tingkat proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap jumlah seluruh LHP yang dihasilkan.

Tabel 3.13 Realisasi IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan							
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	105	25%	28,57%	28,57%	27,27%	32,00%

Pada triwulan III dan IV tahun 2019, Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melaksanakan pemeriksaan kinerja dan telah menerbitkan enam LHP Kinerja yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.14 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Tahun 2019

No.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas	No.	Nama Entitas
1.	Kinerja Pemanfaatan Aset Daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d Semester I Tahun 2019	1.	Kota Bengkulu
2.	Kinerja Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018	2.	Provinsi Bengkulu
		3.	Kabupaten Kepahiang
3.	Kinerja Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019	4.	Kabupaten Bengkulu Selatan
		5.	Kabupaten Bengkulu Tengah
4.	Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Lainnya di Provinsi Bengkulu	6.	KPU Provinsi Bengkulu

Dengan demikian nilai IK 1.1.2 tahun 2019 adalah sebesar 105.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 1.1.2 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi IK 1.1.2 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan								
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	14%	15%	22%	25%	25%	28,57%	114,28%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.1.2, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.407.770.600,00 dengan realisasi sebesar Rp1.819.787.926,00 atau 75,58%.



Gambar 3.3 Penyerahan LHP Kinerja Tahun 2019

3. Realisasi IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP tahun 2019 sebesar 100% atau telah mencapai target tahun 2019 sebesar 100%. IK ini menunjukkan menunjukkan tingkat evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh satker pemeriksaan.

Tabel 3.16 Realisasi IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan							
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100	100%	100%	100%	-	-

Pada tahun 2019, Perwakilan Provinsi Bengkulu telah mendapat penilaian Tingkat Evaluasi LHP dengan nilai 100%. Dengan demikian, nilai IK 1.1.3 tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 1.1.3 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi IK 1.1.3 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan								
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	-	-	100%	100%	100%	100%	

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.1.3, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.104.818.592,00 dengan realisasi sebesar Rp2.104.818.592,00 atau 100,00%.

Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan Kualitas Hasil Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara diukur melalui 3 IK, yaitu IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara dengan target tahun 2019 sebesar 22, dan IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang dengan target tahun 2019 sebesar 100%.

Adapun realisasi dan nilai IK masing-masing upaya peningkatan fungsi Kualitas Hasil Pemeriksaan tersebut pada tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Realisasi IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tahun 2019 adalah 100% atau sama dengan target tahun 2019 sebesar 100%. IK ini menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Tabel 3.18 Realisasi IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara							
IK	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut	100,00	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2.1	Hasil Pemeriksaan						

Selama tahun 2019, Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah memutakhirkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada sebelas entitas. Pemantauan tindak lanjut tersebut dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK Bengkulu melalui forum pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dengan pihak Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d. 5 Juli 2019 dan *Focus Group Discussion* (FGD) Eksekutif, Pemantauan TLRHP dan Sosialisasi SIPTL pada tanggal 11 s.d. 15 November 2019. Forum tersebut diikuti oleh para Kepala Daerah, Kepala Inspektorat dan pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Pada forum tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga melakukan pendampingan bagi entitas yang menghadapi kendala dalam memanfaatkan aplikasi SiPTL. Dengan demikian nilai IKU 1.2.1 tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 1.2.1 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi IK 1.2.1 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 1.2 Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara								
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.2.1, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp36.706.000,00 dengan realisasi sebesar Rp36.628.254,00 atau 99,79%.

2. Realisasi IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara tahun 2019 adalah 22 laporan atau sama dengan target tahun 2019 sebesar 22 laporan. Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh Auditorat/Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Revbang.

Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS non bendaharawan dan pihak ketiga.

Tabel 3.20 Realisasi IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara							
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	100,00	22	22	22	22	22

Pada tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melaksanakan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah pada sebelas entitas dengan menerbitkan 22 laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah yaitu sebelas laporan untuk periode Semester I Tahun 2019 dan sebelas laporan untuk periode Semester II Tahun 2019. Dengan demikian nilai IK 1.2.2 tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 1.2.1 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi IK 1.2.1 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 1.2 Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara								
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22	22	22	22	22	22	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.2.2, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp239.404.000,00 dengan realisasi sebesar Rp196.110.221,00 atau 81,92%.

3. Realisasi IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang tahun 2019 telah mencapai 100,00% atau sama dengan target tahun 2019 sebesar 100%. Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh Auditorat/Perwakilan ke Dit. EPP adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS. Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan melalui input ke SIKAD.

Tabel 3.22 Realisasi IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara							
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100,00	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Selama tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menerbitkan 22 laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah pada 11 entitas dan diserahkan ke Direktorat EPP dengan tepat waktu yaitu sesuai dengan petunjuk teknis pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yaitu maksimal 14 hari setelah semester berakhir. Dengan demikian nilai IK 1.2.3 tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 1.2.3 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi IK 1.2.3 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 1.2 Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara								
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Untuk melaksanakan kegiatan IK 1.2.3, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp79.801.000,00 dengan realisasi sebesar Rp65.370.074,00 atau 81,92%.

Startegi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan fungsi Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan diukur melalui 4 IK, yaitu IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) dengan target tahun 2019 sebesar 100%, IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK dengan target tahun 2019 sebesar 3,90, IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP dengan target tahun 2019 sebesar 100%, dan IK 2.1.4 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang dengan target tahun 2019 sebesar 100%.

Adapun realisasi dan nilai IK masing-masing upaya peningkatan fungsi Kualitas Hasil Pemeriksaan tersebut pada tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Realisasi IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) tahun 2019 adalah sebesar 100% atau sama dengan target tahun 2019 sebesar 100%. IK ini menunjukkan sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan dan Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Tabel 3.24 Realisasi IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2019	Target 2019	Capaian			
			2019	2018	2017	2016
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						
IK 2.1.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Dengan demikian nilai IK 2.1.1 tahun 2019 adalah sebesar 100.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 2.1.1 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi IK 2.1.1 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan							
IK 2.1.1 Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 2.1.1, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp717.780.600,00 dengan realisasi sebesar Rp717.780.600,00 atau 100,00%.

2. Realisasi IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK tahun 2019 adalah sebesar 4,57 atau melampaui target tahun 2019 sebesar 3,90. Indikator tingkat kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK, yang diukur

berdasarkan persepsi auditee melalui survei tingkat kepuasan. Dimensi yang diukur mencakup Integritas, Independensi, Profesionalisme.

Tabel 3.26 Realisasi IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan							
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	105	3,90	4,57	4,47	4,49	4,27

Dengan demikian nilai IK 2.1.2 tahun 2019 adalah sebesar 105.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 2.1.2 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi IK 2.1.1 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan								
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,57	114,25%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 2.1.2, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp141.734.000,00 dengan realisasi sebesar Rp139.781.343,00 atau 98,62%.

- Realisasi IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP tahun 2019 adalah 100,00% atau sama dengan target tahun 2019 sebesar 100%. Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada perencanaan penyelesaian yang dinyatakan dalam program pemeriksaan.

Tabel 3.28 Realisasi IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan							
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100	100%	100%	100%	100%	100%

Dari sebelas LHP laporan keuangan, enam LHP Kinerja, sebelas LHP DTT Banpapol, dan empat LHP DTT Belanja Modal yang diterbitkan, penyampaiannya kepada entitas seluruhnya telah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan peraturan perundangan atau yang telah direncanakan dalam program pemeriksaan. Dengan demikian nilai IK 2.1.3 tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

Tabel 3.29 Realisasi Pemeriksaan LKPD TA 2018

Entitas	Opini	Tanggal Penyerahan LK Unaudited	Tanggal Penyerahan LHP Seharusnya	Tanggal Surat Keluar	Tanggal Penyerahan LHP
Provinsi Bengkulu	WTP	25 Maret 2019	25 Mei 2019	22 Mei 2019	23 Mei 2019
Kabupaten Mukomuko	WTP	25 Maret 2019	25 Mei 2019	14 Mei 2019	15 Mei 2019
Kabupaten Bengkulu Utara	WTP	22 Maret 2019	22 Mei 2019	14 Mei 2019	15 Mei 2019
Kabupaten Bengkulu Tengah	WDP	25 Maret 2019	25 Mei 2019	20 Mei 2019	23 Mei 2019
Kabupaten Kaur	WDP	22 Maret 2019	22 Mei 2019	17 Mei 2019	20 Mei 2019
Kabupaten Lebong	WTP	22 Maret 2019	22 Mei 2019	20 Mei 2019	21 Mei 2019
Kota Bengkulu	WTP	25 Maret 2019	25 Mei 2019	23 Mei 2019	24 Mei 2019
Kabupaten Bengkulu Selatan	WDP	25 Maret 2019	25 Mei 2019	20 Mei 2019	21 Mei 2019
Kabupaten Rejang Lebong	WTP	22 Maret 2019	22 Mei 2019	15 Mei 2019	16 Mei 2019
Kabupaten Kepahiang	WTP	25 Maret 2019	25 Mei 2019	15 Mei 2019	16 Mei 2019
Kabupaten Seluma	WDP	29 Maret 2019	29 Mei 2019	27 Mei 2019	28 Mei 2019



Gambar 3.4 Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan TA 2018



Gambar 3.5 Penyerahan LHP atas Belanja Provinsi Bengkulu TA 2019

Tabel 3.30 Realisasi Pemeriksaan Kinerja

No	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas	Tanggal Penyerahan LHP Seharusnya	Tanggal Surat Keluar	Tanggal Penyerahan LHP
1.	Kinerja Pemanfaatan Aset Daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2017 s.d Semester I Tahun 2019	8 Januari 2020	20 Desember 2019	31 Desember 2019
2.	Kinerja Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Provinsi Bengkulu	31 Desember 2019	20 Desember 2019	31 Desember 2019
3.	Kinerja Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 pada Kabupaten Kepahiang	31 Desember 2019	20 Desember 2019	31 Desember 2019
4.	Kinerja Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Kabupaten Bengkulu Selatan	31 Desember 2019	20 Desember 2019	31 Desember 2019
5.	Kinerja Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Kabupaten Bengkulu Tengah	31 Desember 2019	20 Desember 2019	31 Desember 2019
6.	Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Lainnya di Provinsi Bengkulu	8 Januari 2020	20 Desember 2019	30 Januari 2020

Tabel 3.31 Realisasi PDDT Bantuan Partai Politik TA 2019

Entitas Partai Politik di	Tanggal Penyerahan LK	Tanggal Penyerahan LHP Seharusnya	Tanggal Surat Keluar	Tanggal Penyerahan LHP
Provinsi Bengkulu	Januari 2019	30 April 2019	30 April 2019	30 April 2019
Kabupaten Mukomuko	Januari 2019	30 April 2019	30 April 2019	30 April 2019
Kabupaten Bengkulu Utara	Januari 2019	30 April 2019	30 April 2019	30 April 2019
Kabupaten Bengkulu Tengah	Januari 2019	30 April 2019	30 April 2019	30 April 2019
Kabupaten Kaur	Januari 2019	30 April 2019	30 April 2019	30 April 2019
Kabupaten Lebong	Januari 2019	30 April 2019	30 April 2019	30 April 2019
Kota Bengkulu	Januari 2019	30 April 2019	30 April 2019	30 April 2019
Kabupaten Bengkulu Selatan	Januari 2019	30 April 2019	30 April 2019	30 April 2019
Kabupaten Rejang Lebong	Januari 2019	30 April 2019	30 April 2019	30 April 2019
Kabupaten Kepahiang	Januari 2019	30 April 2019	30 April 2019	30 April 2019
Kabupaten Seluma	Januari 2019	30 April 2019	30 April 2019	30 April 2019

Tabel 3.32 Realisasi PDDT Tahun 2019

Entitas Pemerintah	Tanggal Penyerahan LHP Seharusnya	Tanggal Surat Keluar	Tanggal Penyerahan LHP
Belanja Provinsi Bengkulu	20 Februari 2020	17 Januari 2020	20 Januari 2019
Belanja Kabupaten Seluma	17 Februari 2020	17 Januari 2020	20 Januari 2019
Belanja Kabupaten Mukomuko	17 Februari 2020	17 Januari 2020	20 Januari 2019
Belanja Kabupaten Lebong	20 Februari 2020	17 Januari 2020	20 Januari 2019

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 2.1.3 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi IK 2.1.3 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan							
IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 2.1.3, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp492.392.000,00 dengan realisasi sebesar Rp482.385.917,00 atau 97,97%.

4. Realisasi IK 2.1.4 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang adalah sebesar 100% atau sama dengan target tahun 2019 sebesar 100%. IK ini menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat dan

dinyatakan kalah di pengadilan. Apabila belum terdapat LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang, Perwakilan tetap mendapat nilai sebesar 100%.

Tabel 3.34 Realisasi IK 2.1.4 Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2019	Target 2019	Capaian				
			2019	2018	2017	2016	
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan							
IK 2.1.4	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100,00	100%	100,00%	100,00%	100,00%	-

Sampai dengan tahun 2019, tidak terdapat LHP yang diterbitkan oleh Perwakilan Provinsi Bengkulu yang digugat. Dengan demikian nilai IK 2.1.4 tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 2.1.4 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi IK 2.1.4 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan							
IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	-	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 2.1.4, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp70.544.000,00 dengan realisasi sebesar Rp69.110.449,00 atau 97,97%.

Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independensi dan Profesional di Lingkungan Perwakilan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk menciptakan budaya berintegritas, independensi dan profesional di lingkungan perwakilan diukur melalui 3 IK, yaitu IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK dengan target tahun 2019 sebesar 5, IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK dengan target tahun 2019 sebesar 5, dan IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin dengan target tahun 2019 sebesar 100%.

Adapun realisasi dan nilai IK masing-masing upaya menciptakan budaya berintegritas, independensi dan profesional di lingkungan perwakilan pada tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Realisasi IK 3.1.1 Indeks pemahaman pegawai terhadap visi misi dan nilai dasar BPK sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 4,68 atau belum mencapai target tahun 2019 sebesar 5,00.

Tabel 3.34 Realisasi IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independensi dan Profesional di Lingkungan Perwakilan							
IK	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi	93,6	5,00	4,68	3,92	-	-
3.1.1	Misi dan Nilai Dasar						

Dengan demikian nilai IK 3.1.1 tahun 2019 adalah sebesar 93,6.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 3.1.1 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.35 Perbandingan Realisasi IK 3.1.1 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independensi dan Profesional di Lingkungan Perwakilan								
IK	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	-	-	5,00	5,00	5,00	4,68	93,6%
3.1.1								

2. Realisasi IK 3.1.2 Indeks implementasi nilai dasar BPK sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 4,71 atau belum mencapai target tahun 2019 sebesar 5,00.

Tabel 3.36 Realisasi IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independensi dan Profesional di Lingkungan Perwakilan							
IK	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	94,2	5,00	4,71	4,68	-	-
3.1.2							

Dengan demikian nilai IK 3.1.2 tahun 2019 adalah sebesar 94,2.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 3.1.2 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi IK 3.1.2 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 3.1 Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	-	-	5,00	5,00	5,00	4,71	94,2%
3.1.2								

3. Realisasi IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin telah mencapai 100,00% atau sama dengan target tahun 2019 sebesar 100%. IK ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai.

Tabel 3.38 Realisasi IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independensi dan Profesional di Lingkungan Perwakilan							
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100,00	100%	100%	100%	100%	-

Pada tahun 2019, tidak terdapat pejabat dan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Disiplin. Dengan demikian nilai IK 3.1.3 tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 3.1.3 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.39 Perbandingan Realisasi IK 3.1.3 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 3.1 Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.1.1, IK 3.1.2, dan IK 3.1.3, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.075.838.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.042.710.860,00 atau 99,19%.

Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan diukur melalui 7 IK, yaitu IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan target tahun 2019 adalah AA, IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dengan target tahun 2019 sebesar 95%, IK 3.2.3 Jumlah *best-practice* yang disusun dengan target tahun 2019 sebanyak 1 (satu), IK 3.2.4 Tingkat penerapan *best-practice* dengan target tahun 2019 sebesar 100%, IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan output dan kinerja dengan target tahun 2019 sebesar 100,00%, IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana dengan target tahun 2019 sebesar 95%, dan IK 3.2.7 Jumlah Media Relation yang dilaksanakan dengan target tahun 2019 adalah 2 (dua).

Adapun realisasi dan nilai IK masing-masing upaya meningkatkan kualitas organisasi di Lingkungan Perwakilan tersebut pada tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Realisasi IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 yaitu memperoleh nilai A atau belum mencapai target tahun 2019 yaitu perolehan nilai AA. Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK.

Tabel 3.40 Realisasi IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2018	2017	2016	
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan							
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu	90	AA	A	A	A	A

Pada tahun 2019, Perwakilan Provinsi Bengkulu telah memperoleh penilaian dari Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan nilai sebesar 80,30% atau dengan kategori "A" (Memuaskan). Dengan demikian nilai IK 3.2.1 tahun 2019 adalah sebesar 90,00.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 3.2.1 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi IK 3.2.1 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 3.1 Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	AA	AA	A	90%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.1, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp860.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp756.463.911,00 atau 87,87%.

- Realisasi IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2019 telah mencapai 98,85% atau telah melampaui target tahun 2019 sebesar 95%. BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (email, e-Drive, Portal), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, e-Audit, SIPTL). Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal. IKU ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong *IT culture* di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Tabel 3.41 Realisasi IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2018	Target 2018	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan							
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	104,05	95%	98,85%	97,78%	85,16%	79,68%

Pada tahun 2019, Perwakilan Provinsi Bengkulu memperoleh nilai tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dari Biro TI dengan rincian sebagai berikut (1) Layanan dasar: Email, e-Drive, dan Portal sebesar 100%, (2) Layanan aplikasi umum: SISDM sebesar 96,15%, dan (3) Layanan pemeriksaan: SMP, e-Audit dan SIPTL sebesar 100% atau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.42 Hasil Evaluasi tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Uraian Layanan	Rincian layanan TIK yang dimanfaatkan	Nilai Pemanfaatan TIK	Nilai Rata-rata Pemanfaatan TIK
Layanan Dasar	Email	100,00%	100,00%
	e-Drive	100,00%	
	Portal	100,00%	
Layanan Aplikasi Kelembagaan	SISDM	96,15%	96,15%
Layanan Aplikasi Pemeriksaan	SMP	100,00%	100,00%
	e-Audit	100,00%	
	SIPTL	100,00%	
Rata-Rata Pemanfaatan TIK			98,85%

Dari hasil evaluasi Biro TI di atas diketahui bahwa Perwakilan Provinsi Bengkulu telah optimal dalam pemanfaatan layanan aplikasi SISDM, SMP dan Portal e-Audit. Sebagian besar pemanfaatan portal e-Audit digunakan untuk mengecek manifest dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara pada saat pemeriksaan LKPD dan PDTT. Sedangkan aplikasi SMP dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendokumentasikan informasi yang terkait tahapan-tahapan dalam kegiatan pemeriksaan. Dengan demikian nilai IK 3.2.2 tahun 2019 adalah sebesar 104,05.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 3.2.2 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi IK 3.2.2 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 3.1 Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	80%	95%	100%	98,85%	98,85%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.2, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp996.521.000,00 dengan realisasi sebesar Rp996.521.000,00 atau 100,00%.

- Realisasi IK 3.2.3 Jumlah *Best-Practice* yang disusun tahun 2019 adalah sebanyak 1 (satu) atau sama dengan target tahun 2019 yaitu sebanyak 1 (satu). *Best-practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *best-practice*.

Pada tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyampaikan usulan *Best Practice* yang disampaikan kepada Direktorat PSMK yaitu usulan *Best Practice* terkait "Gerakan Budaya Green Office dalam Rangka Mendukung Program *Go Green*".

Tabel 3.44 Realisasi IK 3.2.3 Persentase Penyusunan *Best-Practice* Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2019	Target 2019	Capaian			
			2019	2018	2017	2016
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	100,00	1,00	1,00	-	-

Usulan *Best Practice* tersebut telah mendapat penilaian memenuhi kriteria sebagai *Innovative Practice* dari Direktorat PSMK. Dengan demikian, nilai IK 3.2.3 tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 3.2.3 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi IK 3.2.3 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 3.1 Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan							
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	-	-	1	1	1	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.3, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp779.976.000,00 dengan realisasi sebesar Rp685.372.753,00 atau 87,87%.

- Realisasi IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best-Practice* tahun 2019 telah mencapai 100% atau telah mencapai target tahun 2019 sebesar 100%. IK ini mengukur tingkat penerapan atas *Best Practice* yang telah disetujui pada periode tahun sebelumnya pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan.

Tabel 3.46 Realisasi IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best-Practice* Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2019	Target 2019	Capaian			
			2019	2018	2017	2016
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best-Practice</i>	100,00	100%	100%	-	-

Dengan demikian, nilai IK 3.2.3 tahun 2019 adalah sebesar 100.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 3.2.4 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.47 Perbandingan Realisasi IK 3.2.4 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 3.1 Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan							
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan Best Practice	-	-	100%	100%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.4, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp638.580.000,00 dengan realisasi sebesar Rp638.580.000,00 atau 100,00%.

5. Realisasi IK 3.2.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2019 telah mencapai 100,00% atau sudah memenuhi target tahun 2019 sebesar 100,00%. Ketepatan waktu LAK adalah sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen terkait Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja.

Tabel 3.48 Realisasi IK 3.2.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2019	Target 2019	Capaian				
			2019	2018	2017	2016	
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan							
IK 3.2.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100,00	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Pada tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah menyampaikan Laporan Output dan Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2018 kepada Direktorat PSMK secara tepat waktu. Dengan demikian, nilai IK 3.1.4 tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 3.2.5 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi IK 3.2.5 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
	2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 3.1 Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan							
IK 3.2.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.5, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp961.809.000,00 dengan realisasi sebesar Rp961.809.000,00 atau 100,00%.

6. Realisasi IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana tahun 2019 telah mencapai 97,21% atau sudah melampaui target tahun 2019 sebesar 95%. Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam

perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar Sarana dan Prasarana Kerja BPK.

Tabel 3.50 Realisasi IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan							
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	102,32	95%	97,21%	94,97%	94,40%	94,21%

Pada tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah melaksanakan pemenuhan standar sarana mencapai 98,90%, sedangkan pemenuhan standar prasarana telah mencapai 95,51%. Sehingga rata-rata secara keseluruhan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar mencapai 97,21%. Dengan demikian nilai IK 3.2.7 tahun 2019 adalah sebesar 102,32.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 3.2.6 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi IK 3.2.6 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 3.1 Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	92%	93%	95%	100%	97,21%	97,21%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.6, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.004.961.000,00 dengan realisasi sebesar Rp883.069.334,00 atau 87,87%.

7. Realisasi IK 3.2.7 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan Tahun 2019 telah mencapai 9,80 atau sudah melampaui target tahun 2019 sebesar 2 (dua). Kegiatan *media relation* merupakan salah satu bentuk kegiatan hubungan dan kerjasama dengan media massa. Kegiatan *media relation* dapat diselenggarakan dalam bentuk: (1) Sosialisasi kepada wartawan mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dan (2) Pelatihan (*workshop*) bagi para wartawan dalam proses pembelajaran mengenai hal-hal yang terkait dengan teknis pemeriksaan.

Tabel 3.52 Realisasi IK 3.2.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan							
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	105,00	2,00	9,80	2,40	4	2,8

Dengan demikian nilai IK 3.2.7 tahun 2019 adalah sebesar 105,00.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 3.2.7 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.53 Perbandingan Realisasi IK 3.2.7 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 3.1 Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.2.7	Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan	2	2	2	2	6	9,80	163,33%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.2.7, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp541.361.000,00 dengan realisasi sebesar Rp497.184.847,00 atau 91,84%.

Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan diukur melalui 2 IK, yaitu IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa dengan target 2019 sebesar 100%, dan IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) dengan target tahun 2019 sebesar 100%.

Adapun realisasi dan nilai IK masing-masing upaya meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan tersebut pada tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Realisasi IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa tahun 2019 yaitu sebesar 100% atau mencapai target tahun 2019 sebesar 100%. Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun.

Tabel 3.54 Realisasi IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan							
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100	100%	100%	92,59%	97,30%	100,00%

Pada tahun 2019, pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah memenuhi jam pelatihan 40 jam. Dengan demikian, nilai IK 3.3.1 tahun 2019 adalah sebesar 100,00.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 3.3.1 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.55 Perbandingan Realisasi IK 3.3.1 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020
		2016	2017	2018	2019	2020		
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.3.1, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp301.419.000,00 dengan realisasi sebesar Rp301.071.095,00 atau 99,88%.

2. Realisasi IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) tahun 2019 yaitu sebesar 96% atau belum mencapai target sebesar 100%.

Tabel 3.56 Realisasi IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Strategi 3.3. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan							
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	96,00	100%	96%	92,00%	100,00%	93,33%

Pada tahun 2019, pegawai non-pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu belum semua memenuhi jam pelatihan 20 jam. Dengan demikian, nilai IK 3.3.2 tahun 2019 adalah sebesar 96,00.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 3.3.2 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.55 Perbandingan Realisasi IK 3.3.2 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020					
	2016	2017	2018	2019	2020							
Strategi 3.3 Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan												
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)					100%	100%	100%	100%	100%	96%	96%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.3.2, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp100.473.000,00 dengan realisasi sebesar Rp100.357.032,00 atau 99,88%.



Gambar 3.5 Diklat Pemeriksaan Infrastruktur

Strategi 3.4 Tingkat Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan diukur melalui satu IK, yaitu IK 3.4.1 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan dengan target tahun 2019 sebesar 80%.

Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan PMK 249 tahun 2011, dinilai dari empat indikator, yaitu: (1) penyerapan anggaran, (2) konsistensi antara perencanaan dan implementasi, (3) pencapaian keluaran, dan (4) efisiensi.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun

anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Realisasi IK 3.4.1 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan tahun 2019 telah mencapai 90,71% atau melampaui target tahun 2019 sebesar 80,00%.

Tabel 3.56 Realisasi IK 3.4.1 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor 2019	Target 2019	Capaian				
			2019	2018	2017	2016	
Strategi 3.4 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan							
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	105	80%	90,71%	78,24%	84,52%	88,37%

Pada tahun 2019, tingkat kinerja implementasi anggaran adalah sebesar 90,71%. Dengan demikian nilai IK 3.4.1 tahun 2019 adalah sebesar 105.

Sementara itu, perbandingan realisasi IK 3.4.1 Tahun 2019 terhadap target tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi IK 3.4.1 Tahun 2019 dengan Target Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahunan					Realisasi 2019	% Realisasi 2019 dibanding Target 2020	
	2016	2017	2018	2019	2020			
Strategi 3.4 Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan								
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%	82%	85%	80%	90%	90,71%	100,79%

Untuk melaksanakan kegiatan IK 3.4.1, pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp619.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp615.739.847,00 atau 99,43%.

B. Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Realisasi Belanja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2019 adalah sebesar Rp18.309.589.378,00 atau 93,95% dari anggaran belanja sebesar Rp19.487.736.000,00. Rincian anggaran belanja TA 2019 dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.58 dan Bagan 3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2019

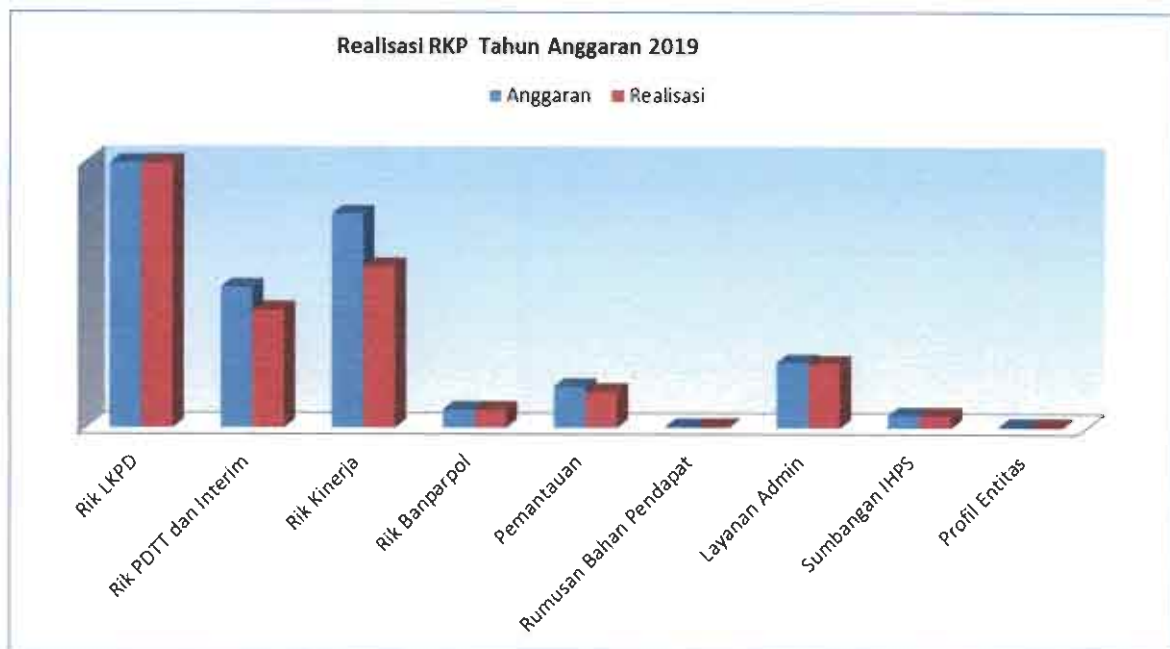
Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2019		
		Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	4.075.838.000,00	4.042.710.860,00	99,19
52	Belanja Barang	14.406.937.000,00	13.368.116.591,00	92,97
53	Belanja Modal	1.004.961.000,00	997.635.500,00	99,27
	Pengembalian Belanja		98.873.573,00	0,00
		19.487.736.000,00	18.309.589.378,00	93,95



Adapaun realisasi belanja yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan berupa Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun Anggaran 2019 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.59 dan Bagan 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja RKP Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Pemeriksaan LKPD	2.979.685.648,00	2.979.685.648,00	100,00
2	Pemeriksaan PDTT dan Interim	1.585.967.552,00	1.332.537.386,00	84,02
3	Pemeriksaan Kinerja	2.407.770.600,00	1.819.787.926,00	75,58
4	Pemeriksaan Banparpol	204.382.200,00	204.382.200,00	100,00
5	Pemantauan	466.030.000,00	407.993.310,00	87,55
6	Rumusan Bahan Pendapat	14.853.000,00	14.769.400,00	99,44
7	Layanan Admin	740.085.000,00	723.836.930,00	97,80
8	Sumbangan IHPS	141.734.000,00	139.781.343,00	98,62
9	Profil Entitas	18.082.000,00	17.995.500,00	99,52
Jumlah		8.558.590.000,00	7.640.769.643,00	89,28



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan sumbangan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 pada AKN V sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah mencapai skor kinerja Tahun 2019 yaitu sebesar 98,97 dari skor maksimal 105. Ketidaktercapaian ini merupakan implikasi dari beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. IKU 1.1 Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
2. IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK;
3. IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
4. IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja; dan
5. IK 3.3.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (Non Pemeriksa).

Permasalahan dan kendala yang menjadi penyebab tidak tercapainya beberapa target IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, antara lain :

1. Secara keseluruhan, Pemerintah Daerah telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK. Disamping itu, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah berupaya melakukan langkah percepatan penyelesaian tindak hasil pemeriksaan BPK. Namun, rekomendasi yang ditindaklanjuti sebagian besar masih belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut sehingga tidak dapat diperhitungkan ke dalam capaian IKU 1.1. Selain itu, terdapat kecenderungan kurangnya kesadaran entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, khususnya kurang proaktifnya entitas dalam mengupayakan percepatan penyelesaian tindak lanjut; dan
2. Keterbatasan jumlah pemeriksa di perwakilan menyebabkan jadwal diklat berbarengan dengan tugas pemeriksaan dilaksanakan baik oleh pemeriksa maupun non pemeriksa yang diperbantukan dalam pemeriksaan.

Upaya-upaya yang akan dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam rangka pemenuhan target tahun berikutnya diantaranya dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dalam rangka perbaikan pengelolaan kinerja, menyediakan ruang *Helpdesk* Pemantaun Tindak Lanjut dengan tujuan untuk membantu entitas dalam melakukan penginputan pada Aplikasi SIPTL dan membuka forum konsultasi bila menghadapi kendala dalam melaksanakan tindak lanjut rekomendasi BPK. Selain itu, dilakukan upaya sosialisasi kepada pegawai untuk meningkatkan pemahaman terhadap visi misi dan nilai dasar BPK serta meningkatkan standar jam pelatihan bagi pemeriksa dan non pemeriksa.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran : Tahun 2019

	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor Tahun 2019	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019
SS.1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan			
IKU	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	70,62	75%	52,96%
IKU	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100	100%	100%
IKU	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100	100%	100%
IKU	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	105	1	2
Strategi	1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan			
IK	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	105	95%	100%
IK	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	105	25%	28,57%
IK	Tingkat Evaluasi LHP	100	100%	100%
Strategi	1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara			
IK	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100	100%	100%
IK	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	100	22	22
IK	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100	100%	100%
Strategi	2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan			
IK	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100	100%	100%
IK	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	105	3,90	4,57
IK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100	100%	100%
IK	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100	100%	100%
Strategi	3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan			
IK	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	93,6	5,0	4,68
IK	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	94,2	5,0	4,71
IK	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100	100%	100%
Strategi	3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan			
IK	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	90	AA	A
IK	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	104,05	95%	98,85%
IK	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	100	1	1
IK	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100	100%	100%
IK	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100	100%	100%
IK	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	102,32	95%	97,21%

Lampiran 1

	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Skor Tahun 2019	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019
3.2.6				
IK				
3.2.7	Jumlah Media Relation yang dilaksanakan	105	2	9,80
Strategi	3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan			
IK	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100	100%	100%
3.3.1				
IK	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	96	100%	96%
3.3.2				
Strategi	3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan			
IK	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	105	80%	90,71%
3.4.1				